PERAN *DIGITAL CITIZENSHIP* DALAM MENGHADAPI DISINFORMASI DAN *FAKE NEWS* DI MEDIA SOSIAL: KAJIAN LITERATUR REVIEW

Reni Setiansyah[1*], Prayoga Bestari[2], Pat Kurniati[3]

[1,2] Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
[3] Pendidikan Kewarganegaraan, Institut Pendidikan Indonesia, Garut

Email: [1]renisetiansyah21@upi.edu *; yogabestari@upi.edu ; patkurnia@institutpendidikan.ac.id

Abstract

The increasing spread of disinformation and fake news on social media poses a serious challenge to democracy and citizen participation, highlighting the need to strengthen digital citizenship through digital literacy, critical thinking, digital ethics, and media responsibility. This study analyzes the role of digital citizenship in addressing disinformation and fake news on social media using a Systematic Literature Review (SLR) based on the 2020 PRISMA guidelines. Literature was identified, screened, assessed for eligibility, and included through searches in Google Scholar, yielding 70 initial articles and 25 articles for thematic analysis after duplicate removal and application of inclusion and exclusion criteria. The findings show that digital citizenship strengthens digital literacy, critical thinking, digital ethics, and information verification (fact-checking), thereby enhancing resilience to disinformation. Its integration into Citizenship Education also supports the development of active, critical, and responsible digital citizens. The novelty lies in synthesizing digital literacy, digital ethics, verification practices, and Citizenship Education as an integrated framework for addressing disinformation in Indonesia. These findings provide a reference for developing more effective digital literacy policies, curricula, and programs.

Keywords: digital citizenship; disinformation; fake news; digital literacy; Citizenship Education.

Abstrak

Meningkatnya penyebaran disinformasi dan berita palsu di media sosial menjadi tantangan serius bagi demokrasi dan partisipasi warga negara, sehingga diperlukan penguatan kewarganegaraan digital melalui literasi digital, kemampuan berpikir kritis, etika digital, dan tanggung jawab bermedia. Penelitian ini menganalisis peran kewarganegaraan digital dalam menghadapi disinformasi dan berita palsu di media sosial menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) berdasarkan pedoman PRISMA 2020. Literatur diidentifikasi, diseleksi, dinilai kelayakannya, dan diikutsertakan melalui penelusuran Google Scholar, yang menghasilkan 70 artikel pada tahap awal dan 25 artikel untuk analisis tematik setelah penghapusan artikel duplikat serta penerapan kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewarganegaraan digital memperkuat literasi digital, kemampuan berpikir kritis, etika digital, dan verifikasi informasi (fact-checking), sehingga meningkatkan ketahanan individu terhadap disinformasi. Integrasinya dalam Pendidikan Kewarganegaraan juga mendukung pembentukan warga negara digital yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis literasi digital, etika digital, praktik verifikasi informasi, dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kerangka terpadu dalam menghadapi disinformasi di Indonesia. Temuan ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan, kurikulum, dan program literasi digital yang lebih efektif.

Kata kunci: digital citizenship; disinformation; fake news; literasi digital;Pendidikan Kewarganegaraan.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah cara masyarakat memperoleh, memproduksi, dan menyebarluaskan informasi. Kemudahan akses informasi yang ditawarkan berbagai platform digital tidak hanya memberikan manfaat dalam mempercepat komunikasi dan partisipasi publik, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa meningkatnya penyebaran disinformasi dan fake news. Informasi palsu yang beredar secara masif di media sosial dapat dengan mudah memengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat karena penyebarannya berlangsung cepat dan menjangkau audiens yang luas.

Fenomena tersebut masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengidentifikasi dan mengklarifikasi sebanyak 1.923 konten hoaks, berita bohong, dan informasi palsu sepanjang tahun 2024. Dari jumlah tersebut, kategori penipuan mendominasi dengan 890 konten, disusul kategori politik sebanyak 237 konten, pemerintahan 214 konten, kesehatan 163 konten, dan kebencanaan 145 konten. Temuan ini menunjukkan bahwa disinformasi tidak hanya berkaitan dengan isu sosial sehari-hari, tetapi juga menyentuh aspek politik, pemerintahan, dan kehidupan publik yang berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi serta stabilitas sosial masyarakat Indonesia.

Penyebaran fake news tidak hanya berdampak pada kesalahan informasi, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan sosial. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hoaks yang beredar melalui media sosial dapat memicu polarisasi sosial, konflik digital, ujaran kebencian, serta menurunkan kepercayaan antarwarga (Siahaan et al., 2021; Yue et al., 2019). Pada konteks politik, penyebaran informasi palsu sering dimanfaatkan untuk membentuk opini publik, memperkuat identitas kelompok tertentu, dan memperlebar perpecahan sosial (Sitepu et al., 2021; Dida et al., 2021). Selain itu, rendahnya kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi menyebabkan banyak pengguna media sosial menyebarkan informasi hanya berdasarkan kepercayaan terhadap pengirim atau karena isi informasi dianggap menarik tanpa melakukan pengecekan kebenarannya terlebih dahulu (Fardiah et al., 2020).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama masyarakat digital saat ini tidak hanya terletak pada akses terhadap teknologi, tetapi juga pada kemampuan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Dalam konteks ini, konsep Digital Citizenship menjadi penting untuk dikaji. Ribble (2011) mendefinisikan digital citizenship sebagai norma-norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital. Konsep ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital, termasuk kemampuan mengakses, mengevaluasi, memanfaatkan, dan menyebarkan informasi secara etis dan bertanggung jawab. Melalui digital citizenship, pengguna media sosial diharapkan tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga warga digital yang mampu berpikir kritis dan bertindak sesuai etika digital.

Perkembangan kajian selanjutnya memperluas cakupan konsep ini. Choi (2016), melalui analisis konsep yang lebih baru, merumuskan digital citizenship sebagai konstruksi multidimensi yang mencakup empat kategori saling terkait: etika (ethics), literasi media dan informasi (media and information literacy), partisipasi/keterlibatan (participation/engagement), serta resistansi kritis (critical resistance) terhadap dominasi wacana daring. Perspektif Choi (2016) ini melengkapi kerangka Ribble (2011) dengan menekankan dimensi kewargaan yang lebih partisipatif dan kritis-politis, bukan sekadar kepatuhan pada norma teknis. Kombinasi kedua kerangka tersebut relevan bagi

penelitian ini karena empat kategori Choi (2016) etika, literasi, partisipasi, dan resistansi kritis secara konseptual selaras dengan empat tema sintesis yang ditemukan (lihat bagian Hasil dan Pembahasan), sehingga landasan teoretis kajian ini tidak lagi bertumpu pada satu kerangka tunggal.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa digital citizenship berperan dalam meningkatkan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran etika dalam penggunaan media sosial (Prasetiyo et al., 2021; Wulandari et al., 2021). Pendidikan kewargaan digital yang terintegrasi dengan literasi media juga terbukti mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi hoaks, mengurangi kerentanan terhadap disinformasi, serta mendorong perilaku digital yang bertanggung jawab (Nanda & Budimansyah, 2020; Fardiah et al., 2020). Dengan demikian, digital citizenship dipandang sebagai salah satu pendekatan strategis untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan disinformasi dan fake news di era digital.

Kajian sistematis mengenai persoalan ini telah dilakukan dari beberapa sudut pandang, tetapi belum secara khusus menyintesis digital citizenship sebagai kerangka terpadu. Valverde-Berrocoso et al. (2022) melakukan SLR berbasis PRISMA terhadap 76 artikel (2011–2020) dari WoS, Scopus, dan ERIC, namun berfokus pada peran multiliterasi (literasi media, informasi, berita, dan data) dalam pendidikan melawan disinformasi, dengan digital citizenship hanya muncul sebagai satu dari tiga pendekatan pedagogis, bukan sebagai unit analisis utama. Pérez-Escolar et al. (2023) memetakan tren riset disinformasi dan misinformasi secara luas (756 publikasi, 2014–2022), tetapi kajian tersebut bersifat bibliometrik-konseptual dan tidak menyasar dimensi kewargaan digital maupun konteks pendidikan kewarganegaraan. Sementara itu, kajian-kajian SLR sejenis di Indonesia (mis. terkait post-truth dan pendidikan kewarganegaraan) umumnya bersifat konseptual-naratif tanpa protokol PRISMA yang eksplisit. Dengan demikian, kekosongan yang secara spesifik diisi oleh penelitian ini adalah sintesis sistematis (berprotokol PRISMA 2020) yang secara eksplisit memosisikan digital citizenship mencakup literasi digital, etika digital, verifikasi informasi, dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kerangka terpadu untuk menghadapi disinformasi, khususnya dalam konteks Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana peran digital citizenship dalam menghadapi disinformasi dan fake news di media sosial; dan (2) dimensi digital citizenship apa saja yang berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan pengguna media sosial menghadapi disinformasi dan fake news.

Meskipun penelitian mengenai digital citizenship maupun disinformasi telah berkembang cukup pesat, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek literasi digital, perilaku penggunaan media sosial, atau dampak penyebaran hoaks secara terpisah. Berdasarkan pemetaan gap di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis berbagai hasil penelitian mengenai peran digital citizenship dalam menghadapi disinformasi dan fake news di media sosial melalui metode Systematic Literature Review (SLR). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian digital citizenship serta menjadi dasar bagi penguatan Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk warga negara digital yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian mengenai peran digital citizenship dalam menghadapi disinformasi dan fake news di media sosial.

Metode SLR dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang sistematis dan komprehensif terhadap perkembangan penelitian pada suatu topik (Snyder, 2019). Proses kajian mengacu pada pedoman PRISMA 2020 yang meliputi tahap identification, screening, eligibility, dan inclusion (Page et al., 2021). Kerangka konseptual penelitian didasarkan pada teori digital citizenship Ribble (2011), yang menekankan penggunaan teknologi digital secara bertanggung jawab melalui penguatan literasi digital, etika digital, dan tanggung jawab digital, dilengkapi dengan perspektif Choi (2016) mengenai dimensi partisipasi dan resistansi kritis sebagaimana diuraikan pada bagian Pendahuluan.

Strategi Pencarian dan Basis Data

Pengumpulan literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar, ERIC, dan Dimensions pada rentang publikasi tahun 2020–2026 menggunakan kata kunci "digital citizenship", "fake news", "misinformation", "disinformation", dan "social media", dikombinasikan menggunakan operator Boolean AND/OR.

Rincian jumlah rekam per basis data: Google Scholar (n = 50), ERIC (n = 12), Dimensions (n = 8), dengan total kumulatif n = 70 sebelum penghapusan duplikat.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria diterapkan secara berjenjang pada tahap screening dan eligibility sebagai berikut:

Inklusi: artikel jurnal ilmiah (peer-reviewed); tersedia dalam bentuk full text; berbahasa Indonesia atau Inggris; diterbitkan pada rentang 2020–2026; relevan secara tematik dengan digital citizenship dan/atau disinformasi/fake news di media sosial.

Eksklusi: buku, prosiding, skripsi, tesis, dan disertasi; artikel duplikat lintas basis data; artikel yang tidak relevan dengan fokus penelitian setelah pembacaan judul dan abstrak; artikel yang teks lengkapnya tidak dapat diakses.

Proses Penyaringan (Screening)

Proses penyaringan dilakukan dalam dua tahap oleh peneliti secara independen. Pada tahap pertama, judul dan abstrak seluruh rekam yang telah dibersihkan dari duplikat (n = 60) dinilai kesesuaiannya dengan kriteria inklusi-eksklusi di atas. Rekam yang jelas tidak relevan pada tahap ini dikeluarkan. Pada tahap kedua (eligibility), artikel yang lolos penyaringan judul-abstrak dinilai secara full text untuk memastikan kesesuaian metodologis dan tematik sebelum diputuskan untuk disertakan dalam sintesis akhir. Perbedaan penilaian antarpeneliti, jika ada, diselesaikan melalui diskusi hingga tercapai kesepakatan.

Penilaian Kualitas Studi

Kualitas metodologis setiap artikel yang lolos tahap eligibility dinilai menggunakan instrumen penilaian kualitas yang diadaptasi dari prinsip Critical Appraisal Skills Programme (CASP) untuk studi kualitatif dan mixed-methods, mencakup lima kriteria: (1) kejelasan rumusan tujuan/pertanyaan penelitian; (2) kesesuaian desain dan metode dengan tujuan penelitian; (3) kejelasan prosedur pengumpulan dan analisis data; (4) keterhubungan temuan dengan data yang disajikan; dan (5) relevansi kontribusi studi terhadap topik digital citizenship dan disinformasi. Setiap kriteria dinilai dengan skor 0–2 (0 = tidak terpenuhi, 1 = terpenuhi sebagian, 2 = terpenuhi penuh), sehingga rentang skor total adalah 0-10. Artikel dengan skor >7 dikategorikan berkualitas baik dan disertakan; skor 5-6 disertakan dengan catatan (relevensi tematik tinggi meskipun terdapat kelemahan metodoligis minor); dan skor <5 dikeluarkan dari sintesis akhir

Diagram Alir PRISMA

Tabel 1 merangkum alur seleksi artikel pada setiap tahap PRISMA 2020 beserta jumlah dan alasan eksklusinya.

Tahap	Rincian	n
Identification	Rekam artikel diidentifikasi dari Google Scholar, ERIC, dan Dimensions (2020–2026) dengan kata kunci "digital citizenship", "fake news", "misinformation", "disinformation", "social media"	70
	Dikurangi: artikel duplikat yang dihapus	-10
Screening	Dikeluarkan pada tahap ini, dengan alasan: (a) tidak relevan dengan fokus digital citizenship/disinformasi [n = 30], (b) bukan artikel jurnal ilmiah (buku/prosiding/skripsi/tesis/disertasi) [n = 4], (c) tidak berbahasa Indonesia/Inggris [n = 1], (d) lainnya [n = 1]	-35
Eligibility	Artikel dinilai kelayakannya secara full text terhadap kriteria inklusi-eksklusi dan penilaian kualitas (lihat Tabel Kriteria dan instrumen penilaian kualitas)	25
Included	Artikel disertakan dalam analisis tematik SLR	25

Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) melalui proses pengkodean, pengelompokan, dan sintesis temuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait peran digital citizenship dalam menghadapi disinformasi dan fake news. Tema yang diperoleh kemudian digunakan untuk menjelaskan kontribusi digital citizenship dalam membangun literasi digital, kemampuan berpikir kritis, etika digital, dan perilaku warga digital yang bertanggung jawab di era media sosial. Perlu dicatat bahwa satu artikel dapat memberikan kontribusi pada lebih dari satu tema sintesis apabila temuannya relevan dengan beberapa dimensi digital citizenship sekaligus; oleh karena itu, jumlah kumulatif dukungan artikel pada Tabel 2 (52 dukungan tematik) melebihi jumlah artikel unik yang disertakan (n = 25).

C. Hasil dan pembahasan

Berdasarkan hasil seleksi dan analisis literatur, diperoleh sejumlah artikel yang relevan dengan tema digital citizenship dalam menghadapi disinformasi dan fake news di media sosial. Sintesis terhadap artikel-artikel tersebut menunjukkan adanya empat tema utama yang mendominasi, yaitu: (1) penguatan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis, (2) penguatan etika dan tanggung jawab digital, (3) praktik verifikasi informasi sebagai bentuk implementasi kewargaan digital, serta (4) implikasi penguatan digital citizenship terhadap Pendidikan Kewarganegaraan. Keempat tema tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa penanggulangan disinformasi memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan teknologi, tetapi juga pada pembentukan kompetensi kewargaan digital yang utuh.

Tema Sintesis	Jumlah Artikel Pendukung	Inti Temuan
Literasi Digital dan Kemampuan Berpikir Kritis	16 artikel	Mayoritas penelitian menunjukkan bahwa digital citizenship berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital, kemampuan berpikir kritis,

		civic reasoning, serta kemampuan mengevaluasi informasi dan membedakan fakta dari hoaks.
Etika dan Tanggung Jawab Digital	10 artikel	Etika digital, integritas informasi, tanggung jawab sosial, dan nilai moral (termasuk nilai Pancasila dan kearifan lokal) mencegah penyebaran hoaks dan mendorong perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab.
Verifikasi Informasi dan Praktik Fact-Checking	9 artikel	Kemampuan fact-checking, verifikasi silang, dan evaluasi kredibilitas sumber merupakan implementasi nyata digital citizenship yang efektif mengurangi penyebaran fake news.
Peran Pendidikan Kewarganegaraan	11 artikel	Pendidikan Kewarganegaraan mengintegrasikan literasi digital, etika digital, dan berpikir kritis untuk membentuk warga negara aktif, kritis, dan bertanggung jawab.
Penguatan Ketahanan Demokrasi dan Partisipasi Warga Digital	6 artikel	Digital citizenship mendukung partisipasi warga yang lebih berkualitas, meningkatkan ketahanan demokrasi, dan mengurangi dampak polarisasi.

Berdasarkan hasil seleksi dan analisis literatur, diperoleh sejumlah artikel yang relevan dengan tema digital citizenship dalam menghadapi disinformasi dan fake news di media sosial. Sintesis terhadap artikel-artikel tersebut menunjukkan adanya empat tema utama yang mendominasi, yaitu: (1) penguatan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis, (2) penguatan etika dan tanggung jawab digital, (3) praktik verifikasi informasi sebagai bentuk implementasi kewargaan digital, serta (4) implikasi penguatan digital citizenship terhadap Pendidikan Kewarganegaraan. Keempat tema tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa penanggulangan disinformasi memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan teknologi, tetapi juga pada pembentukan kompetensi kewargaan digital yang utuh.

No	Penulis & Tahun	Jurnal	Tema Sintesis yang Didukung
1	Fatmawati & Habibah (2023)	Pancasila: Jurnal Keindonesiaan	Literasi Digital & Berpikir Kritis
2	Prasetiyo et al. (2021)	Int'l Journal of Evaluation and Research in Education	Literasi Digital & Berpikir Kritis
3	Pertiwi et al. (2025)	Indonesian Journal of Law and Justice	Literasi Digital & Berpikir Kritis; Peran PKn
4	Hendrizal et al. (2025)	Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (JIPDAS)	Literasi Digital & Berpikir Kritis
5	Kristiawan et al. (2026)	Jurnal Inovasi Pendidikan dan Teknologi Informasi	Literasi Digital & Berpikir Kritis
6	Supriyanto (2026)	JUPEIS	Literasi Digital & Berpikir Kritis; Peran PKn
7	Nasoha et al. (2025)	LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin	Literasi Digital & Berpikir Kritis
8	Yanuartha & Hergianasari (2025)	ICSSIET CONGRESS	Literasi Digital & Berpikir Kritis
9	Setyowati et al. (2026)	Jurnal Pendidikan Sosial	Etika & Tanggung Jawab Digital
		Keberagaman	
10	Nanda, A. M. (2026)	Ruang Kata	Etika & Tanggung Jawab Digital
11	Xanderina et al. (2024)	Jurnal Ilmiah Informatika dan Komputer	Etika & Tanggung Jawab Digital
12	Rospitasari et al. (2026)	GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal	Etika & Tanggung Jawab Digital
13	Munandar et al. (2026)	CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora	Etika & Tanggung Jawab Digital; Peran PKn
14	Devi et al. (2026)	Jambura Journal Civic Education	Etika & Tanggung Jawab Digital
15	Kaka et al. (2025)	Tumoutou Social Science Journal	Etika & Tanggung Jawab Digital
16	Putro & Tirza (2026)	Artes Liberales: Journal of Humanities Studies	Verifikasi Informasi
17	Gushevinalti et al. (2024)	Aktual: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat	Verifikasi Informasi
18	Dodi & Amanda (2026)	Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara	Verifikasi Informasi
19	Putra et al. (2025)	Public Policy: Jurnal Ilmu	Verifikasi Informasi

		Sosial dan Kebijakan	
20	Zahirah (2025)	CIVITAS (Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic)	Verifikasi Informasi
21	Nur et al. (2026)	Jurnal Pengabdian Sosial	Verifikasi Informasi
22	Al Khansa et al. (2024)	Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat	Peran PKn
23	Cholifah et al. (2026)	Jurnal Pendidikan, Kebudayaan dan Politik	Peran PKn
24	Zakiyah et al. (2024)	Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat	Peran PKn
25	Nurrohmah et.al. (2026)	Jurnal Literasi Digital	Literasi Digital & Berpikir kritis

Digital Citizenship sebagai Penguat Literasi Digital dan Kemampuan Berpikir Kritis

Hasil sintesis menunjukkan bahwa literasi digital dan kemampuan berpikir kritis merupakan dimensi yang paling dominan dalam membangun *digital citizenship* untuk menghadapi disinformasi dan *fake news* di media sosial. Individu yang memiliki literasi digital yang baik cenderung mampu mengevaluasi informasi secara lebih cermat, membedakan fakta dari opini, serta mengenali karakteristik berita yang mengandung hoaks sebelum memutuskan untuk menyebarkannya. Selain itu, integrasi literasi digital dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terbukti dapat meningkatkan kemampuan analisis peserta didik terhadap informasi yang beredar di ruang digital (Fatmawati & Habibah, 2023; Pertiwi et al., 2025; Hendrizal et al., 2025; Kristiawan et al., 2026; Supriyanto, 2026).

Temuan tersebut sejalan dengan teori *Digital Citizenship* yang dikemukakan oleh Ribble (2011), yang menyatakan bahwa kewargaan digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup perilaku yang bertanggung jawab dalam mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital. Dalam konteks ini, kemampuan berpikir kritis menjadi fondasi penting karena memungkinkan individu melakukan penilaian rasional terhadap kredibilitas informasi dan menghindari penyebaran konten yang menyesatkan.

Hasil kajian ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menempatkan literasi digital sebagai salah satu pilar utama *digital citizenship* dalam dunia pendidikan (Prasetiyo et al., 2021). Penguatan kemampuan berpikir kritis melalui *civic reasoning* dinilai mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap disinformasi pada era *post-truth* (Nasoha et al., 2025; Yanuartha & Hergianasari, 2025). Oleh karena itu, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu mengintegrasikan aktivitas analisis informasi, evaluasi sumber, dan diskusi berbasis kasus aktual agar peserta didik mampu menjadi warga digital yang kritis dan bertanggung jawab.

Meski demikian, tidak seluruh studi pada tema ini menunjukkan hasil yang seragam: beberapa penelitian (Kristiawan et al., 2026) menemukan bahwa penguatan literasi digital pada mahasiswa lebih efektif melalui pendekatan design-based research yang kontekstual, sementara penelitian lain pada jenjang pendidikan dasar (Hendrizal et al., 2025) menunjukkan bahwa dampaknya lebih bergantung pada kesiapan infrastruktur digital sekolah. Variasi ini mengindikasikan bahwa efektivitas literasi digital sebagai penguat digital citizenship bersifat kontekstual, bergantung pada jenjang pendidikan dan ketersediaan sarana

pendukung, sehingga generalisasi lintas konteks perlu dilakukan secara hati-hati.

Penguatan Etika dan Tanggung Jawab Digital dalam Menghadapi Disinformasi

Sintesis literatur menunjukkan bahwa etika digital merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari *digital citizenship*. Rendahnya kesadaran etis dalam menggunakan media sosial berkontribusi terhadap meningkatnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan berbagai bentuk disinformasi. Sebaliknya, nilai-nilai seperti kejujuran, integritas informasi, tanggung jawab sosial, empati, dan pengendalian diri dapat menjadi landasan perilaku warga digital yang lebih bertanggung jawab (Setyowati et al., 2026; Nanda, 2026; Xanderina et al., 2024; Rospitasari et al., 2026).

Jika ditinjau melalui teori Ribble (2011), dimensi *digital etiquette* dan *digital rights and responsibilities* menegaskan bahwa setiap individu memiliki kewajiban moral untuk menggunakan teknologi secara etis dan tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan orang lain. Dengan demikian, etika digital tidak hanya diwujudkan melalui kesopanan dalam berkomunikasi, tetapi juga melalui komitmen untuk menjaga akurasi informasi dan menghormati hak masyarakat memperoleh informasi yang benar.

Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penguatan etika digital perlu menjadi bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan digital (Munandar et al., 2026; Devi et al., 2026). Selain itu, literasi kewarganegaraan yang dipadukan dengan pendidikan karakter dinilai mampu membentuk perilaku remaja yang lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial dan lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi (Kaka et al., 2025). Implikasi praktisnya, pengembangan *digital citizenship* hendaknya tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan tanggung jawab moral. Beranjak dari penguatan nilai dan etika ini, tema berikutnya menyoroti bagaimana nilai tersebut diwujudkan secara konkret melalui praktik verifikasi informasi.

Verifikasi Informasi sebagai Implementasi Nyata Digital Citizenship

Hasil sintesis memperlihatkan bahwa verifikasi informasi (fact-checking) merupakan praktik utama yang mencerminkan implementasi digital citizenship dalam menghadapi disinformasi. Warga digital yang memiliki kompetensi literasi yang baik cenderung melakukan pengecekan fakta, membandingkan informasi dari beberapa sumber, serta mengevaluasi kredibilitas sebelum membagikan suatu konten. Kebiasaan tersebut terbukti dapat mengurangi risiko penyebaran hoaks dan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat di ruang digital (Putro & Tirza, 2026; Gushevinalti et al., 2024; Dodi & Amanda, 2026; Putra et al., 2025; Zahirah, 2025).

Dalam perspektif teori Ribble (2011), praktik verifikasi informasi merupakan bentuk nyata pelaksanaan tanggung jawab warga digital. Hak untuk mengakses informasi harus diimbangi dengan kewajiban untuk memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan telah melalui proses evaluasi dan pemeriksaan yang memadai. Oleh sebab itu, kemampuan melakukan cross-check, memanfaatkan sumber kredibel, dan menerapkan fact-checking menjadi indikator penting dari perilaku kewargaan digital yang bertanggung jawab.

Temuan ini didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan efektivitas pelatihan cek fakta dalam meningkatkan kemampuan masyarakat mengidentifikasi disinformasi dan berita palsu (Nur et al., 2026; Gushevinalti et al., 2024). Bahkan, simulasi verifikasi informasi politik dan penggunaan aplikasi pemeriksa fakta terbukti mampu meningkatkan keterampilan

analitis peserta dalam membedakan informasi yang valid dan yang menyesatkan (Dodi & Amanda, 2026). Oleh karena itu, pembiasaan praktik verifikasi informasi perlu menjadi bagian penting dalam pendidikan literasi digital di sekolah, perguruan tinggi, maupun masyarakat. Praktik verifikasi yang telah terbentuk pada level individu ini pada gilirannya perlu dilembagakan secara sistematis, salah satunya melalui jalur Pendidikan Kewarganegaraan, sebagaimana diuraikan pada tema berikutnya.

Implikasi Digital Citizenship terhadap Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan hasil sintesis, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi strategis dalam membangun kompetensi digital citizenship sebagai respons terhadap meningkatnya disinformasi di media sosial. Penguatan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, etika komunikasi, dan tanggung jawab sosial dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran kewarganegaraan pada era digital (Pertiwi et al., 2025; Al Khansa et al., 2024; Munandar et al., 2026; Cholifah et al., 2026; Supriyanto, 2026).

Secara teoretis, pandangan tersebut sesuai dengan konsep Ribble (2011) yang menempatkan pendidikan sebagai sarana membentuk warga digital yang mampu menggunakan teknologi secara aman, produktif, dan bertanggung jawab. Integrasi digital citizenship dalam Pendidikan Kewarganegaraan memungkinkan peserta didik tidak hanya memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, tetapi juga memiliki kompetensi untuk berpartisipasi secara etis dan kritis dalam ruang digital.

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, terdapat konsistensi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wahana yang efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai kewargaan digital dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap hoaks (Zakiyah et al., 2024; Al Khansa et al., 2024; Munandar et al., 2026). Namun demikian, sebagian besar penelitian masih menitikberatkan pada aspek literasi digital, sementara kajian mengenai pengembangan budaya verifikasi informasi dan penguatan civic responsibility jangka panjang masih relatif terbatas. Kondisi ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan untuk mengembangkan model pembelajaran yang mengintegrasikan literasi digital, etika digital, dan praktik verifikasi informasi secara berkelanjutan.

D. Simpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran digital citizenship dalam menghadapi disinformasi dan fake news di media sosial melalui Systematic Literature Review (SLR). Hasil sintesis menunjukkan bahwa digital citizenship berperan dalam memperkuat literasi digital, berpikir kritis, etika dan tanggung jawab bermedia, serta praktik verifikasi informasi untuk menekan penyebaran disinformasi.

Implikasi teoretis. Kebaruan penelitian terletak pada sintesis yang mengintegrasikan literasi digital, etika digital, fact-checking, dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam satu kerangka konseptual, dengan memperluas landasan Ribble (2011) melalui perspektif Choi (2016) untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap disinformasi, khususnya di Indonesia. Implikasi praktis menunjukkan pentingnya integrasi digital citizenship dalam Pendidikan Kewarganegaraan melalui kebijakan pendidikan, kurikulum, dan program literasi digital guna membentuk warga negara yang kritis, etis, dan bertanggung jawab di ruang digital.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan tiga basis data (Google Scholar, ERIC, dan Dimensions), dominasi artikel nasional terbitan 2025–2026 dengan indeksasi yang belum sepenuhnya mapan, serta potensi subjektivitas dalam pengodean tematik kualitatif. Penelitian selanjutnya

perlu memperluas basis data, menerapkan uji reliabilitas antarpengkode secara kuantitatif, serta menguji efektivitas intervensi digital citizenship melalui studi empiris pada berbagai jenjang pendidikan dan kelompok masyarakat.

Daftar Pustaka

Al Khansa, JN, Intan Maiyuni, NA, Azzahroh, NI, Shandiva, CN, Aini, AN, & Ghozali, I. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan di Era Post-Truth : Menghapus Disinformasi dan Hoax. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (3), Hal 231–253. https://doi.org/10.3342/jkepmas.v1i3.155

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Choi, M. (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the internet age. Theory & Research in Social Education, 44(4), 565–607. https://doi.org/10.1080/00933104.2016.1210549

Cholifah, N., Sari, N., Ricky Rozzaqi, A., & Siswanto, S. (2026). Strategi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk memperkuat literasi digital siswa. *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan dan Politik* , *6* (2), 294–306. https://doi.org/10.24036/jecco.v6i2.98

Devi, L. S., Asmawi, M., & Khabibah, R. N. (2026). Political education and digital literacy: Strategies to counter disinformation in public space. Jambura Journal Civic Education, 6(1). https://doi.org/10.37905/jacedu.v6i1.38158

Dida, S., Hafiar, H., Kadiyono, A. L., & Lukman, S. (2021). Gender, education, and digital generations as determinants of attitudes toward health information for health workers in West Java, Indonesia. Heliyon, 7(1), e05916. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e05916

Dodi, D. J. W., & Amanda, N. P. (2026). Penguatan literasi demokrasi digital bagi generasi muda dalam menangkal disinformasi politik di era media sosial. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara, 7*(1), 1021–1027. Diperoleh dari https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/7739

Fatmawati, F., & Habibah, S. M. (2023). Aktualisasi praktik netizenship mahasiswa dalam *good digital citizenship* Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 3*(1), 70–85. https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.120

Fardiah, D., Rinawati, R., Darmawan, F., Abdullah, A. R., & Lucky, K. (2020). Media literacy for dissemination anticipated fake news on social media. Mediator: Jurnal Komunikasi, 13(2), 278–289. https://doi.org/10.29313/mediator.v13i2.6624

Gushevinalti, G., Sakinah, N. I., & Ridiansyah, O. (2024). Improving the digital skills of young voters through education to prevent election hoaxes using the Kalimasada Mafindo application. *Aktual: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2*(3), 155–160. https://doi.org/10.58723/aktual.v2i3.262

Hendrizal, H., Laili, I., Darwianis, D., Nursi, M., & Daswarman, D. (2025). Penguatan *civic literacy* melalui media digital dalam pembelajaran PPKn. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (JIPDAS), 5*(3), 2923–2930. https://doi.org/10.37081/jipdas.v5i3.3878

Kaka, M. A., Zebua, S. H., Bahagia, Y. A., Lisa, R. F., & Puja, A. (2025). Penggunaan media digital sebagai alat untuk meningkatkan literasi kewarganegaraan dan etika di kalangan remaja. *Tumoutou Social Science Journal, 2*(2), 116–123. https://www.kurniajurnal.com/index.php/tssj/article/download/430/846

Kristiawan, I., Umamy, E., & Hariati, T. (2026). Penguatan *civic literacy* mahasiswa melalui literasi digital dengan pendekatan *design-based research*. *Jurnal Inovasi Pendidikan dan Teknologi Informasi (JIPTI), 7*(1), 143–155. https://doi.org/10.52060/jipti.v7i1.4028

Munandar, A., Japar, M., & Raharjo, R. (2026). Peran pendidikan kewarganegaraan digital dalam menghadapi hoaks dan disinformasi di era media sosial. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 3*(2), 132–138. https://doi.org/10.62710/6yratf27

Nanda, A. M. (2026). Kajian etika *digital citizenship* berbasis kearifan lokal: Bedah nilai *Serat Sana Sunu*. *Ruang Kata, 6*(1), 325–333. https://doi.org/10.53863/jrk.v6i01.2296

Nanda, V., & Budimansyah, D. (2020). Strengthening of digital media literacy-based character education on hoax news spreading to students (Case study on Citizenship Education learning in SMP Negeri 2 Bandung). Journal of Innovation in Educational and Cultural Research, 2(4), 283–290. https://doi.org/10.32535/jicp.v2i4.804

Nasoha, A. M. M., Pusparini, Z. D., Paujia, H., Saputri, V. D., & Anan, H. (2025). Pendidikan kewarganegaraan sebagai strategi *counter disinformation* di era *post-truth*. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2*(5), 873–887.

Nur, S., Yudhyarta, D. Y., Selviani, S., Zariah, S., & Lisa, H. (2026). Sosialisasi *digital citizenship* berbasis akhlak Pancasila dalam menangkal disinformasi bagi mahasiswa STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Indragiri Hilir. *Jurnal Pengabdian Sosial, 3*(7), 673–680.

Nurrohmah, A., Qibtia, A. H., & Mutmainah, A. M. (2026). Literasi digital dan pencegahan hoaks di kalangan pelajar: Strategi edukasi dan efektivitas literasi digital dalam memerangi penyebaran hoaks. *Jurnal Literasi Digital, 6*(1), 1–10.

Page, M. J., et.al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Pérez-Escolar, M., Lilleker, D., & Tapia-Frade, A. (2023). A systematic literature review of the phenomenon of disinformation and misinformation. Media and Communication, 11(2), 76–87. https://doi.org/10.17645/mac.v11i2.6453

Pertiwi, A., Pramudika, N. R., Isnaini, P., & Fikri, R. A. (2025). Membangun literasi digital peserta didik melalui Pendidikan Kewarganegaraan di era globalisasi media sosial. Indonesian Journal of Law and Justice, 2(1), 34–41. http://kurniajurnal.com/index.php/ijlj/article/download/432/855

Prasetiyo, W. H., Naidu, N. B. M., Tan, B. P., & Sumardjoko, B. (2021). Digital citizenship trend in educational sphere: A systematic review. International Journal of Evaluation and Research in Education, 10(4), 1192–1201. https://doi.org/10.11591/ijere.v10i4.21767

Putra, M. R. S., Maulana, A., & Putri, M. (2025). Digital literacy and active

citizenship: Strengthening participatory democracy on social media. *Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial dan Kebijakan, 2*(2), 156–170. https://doi.org/10.61166/policy.v2i2.29

Putro, G. A., & Tirza, J. (2026). Literasi digital sebagai pilar pembentukan karakter antihoaks di era *post-truth*. *Artes Liberales: Journal of Humanities Studies, 2*(2), 36–44. https://ojs.uph.edu/index.php/ArtLib/article/view/10838

Ribble, M. (2011). Digital citizenship in schools (2nd ed.). International Society for Technology in Education.

Rospitasari, M., Sholihah, L., Dewandaru, D. A. K., Bulan, W. R., & Wijaya, D. R. (2026). Transformasi etika digital: Membangun kewargaan digital kritis (*critical digital citizenship*) di tengah hegemoni algoritma. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 13*(5), 141–149. https://doi.org/10.56015/gjikplp.v13i5.872

Setyowati, F. I., Amaliah, N. A., & Irawan, A. D. (2026). Tinjauan etika warga digital dalam perspektif nilai Pancasila: *A review of digital citizens' ethics from the perspective of Pancasila values*. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman, 13*(1), 1–6. https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v13i1.533

Siahaan, C., Nahria, N., & Tampubolon, M. (2021). Strategy for identification of hoax news in digital media in facing case of racism of Papua students in Indonesia. Technium Social Sciences Journal, 21, 420–430. https://doi.org/10.47577/tssj.v21i1.3959

Sitepu, Y. S., Harahap, H., & Trimurni, F. (2021). Digital literacy of social media users in Medan City in facing hoax. International Journal of Modern Trends in Social Sciences, 4(15), 74–83. https://doi.org/10.35631/IJMTSS.415009

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Supriyanto, A. (2026). Integrasi literasi digital dalam pembelajaran PPKn untuk pembentukan *digital citizenship* di era Society 5.0. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5*(2), 29–36. https://doi.org/10.57218/jupeis.Vol5.Iss2.2616

Valverde-Berrocoso, J., González-Fernández, A., & Acevedo-Borrega, J. (2022). Desinformación y multialfabetización: Una revisión sistemática de la literatura. Comunicar, 30(70), 97–110. https://doi.org/10.3916/C70-2022-08

Wulandari, E., Winarno, W., & Triyanto, T. (2021). Digital citizenship education: Shaping digital ethics in Society 5.0. Universal Journal of Educational Research, 9(5), 1059–1065. https://doi.org/10.13189/ujer.2021.090507

Xanderina, M., Putri, M. R. K., & Parhusip, J. (2024). Peran etika dalam pencegahan penyalahgunaan teknologi informasi pada media sosial. *Jurnal Ilmiah Informatika dan Komputer, 1*(2), 211–217. https://ejournal.rizaniamedia.com/index.php/informatech

Yanuartha, RA, & Hergianasari, P. (2025). Kewarganegaraan Digital dan Disinformasi: Peran Teknologi Pendidikan dalam Memperkuat Demokrasi di Indonesia. Dalam ICSSIET CONGRESS (Vol. 99, No. 107, hlm. 50). https://www.icssietcongress.com/_file

s/ugd/2a6f60_7157718e0ae141c7b7f0332e46397da6.pdf#page=62

Yue, A., Nekmat, E., & Beta, A. R. (2019). Digital literacy through digital citizenship: Online civic participation and public opinion evaluation of youth minorities in Southeast Asia. Media and Communication, 7(2), 100–114. https://doi.org/10.17645/mac.v7i2.1899

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2025). Komdigi identifikasi 1.923 konten hoaks sepanjang tahun 2024. https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-identifikasi-1923-konten-hoaks-sepanjang-tahun-2024

Zahirah, A. (2025). The role of citizens in countering disinformation and hate speech on social media. *CIVITAS (Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic), 11*(2), 19–31. https://doi.org/10.36987/civitas.v11i2.7353

Zakiyah, A., Rahmawati, R. I., Amalia, R., Sasmita, R. D., Maydiyanti, P., & Ghozali, I. (2024). Kewarganegaraan digital di era *post-truth*: Menghadapi tantangan berita palsu di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1*(2), 96–104. https://doi.org/10.3342/jkepmas.v1i2.121